

Pemerintah Kota Surabaya



RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	7
I.4 Sistematika Penulisan.....	8
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	12
II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	12
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	45
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	45
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	49
VI.1 Program dan Kegiatan.....	49
Bab V Penutup.....	58

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

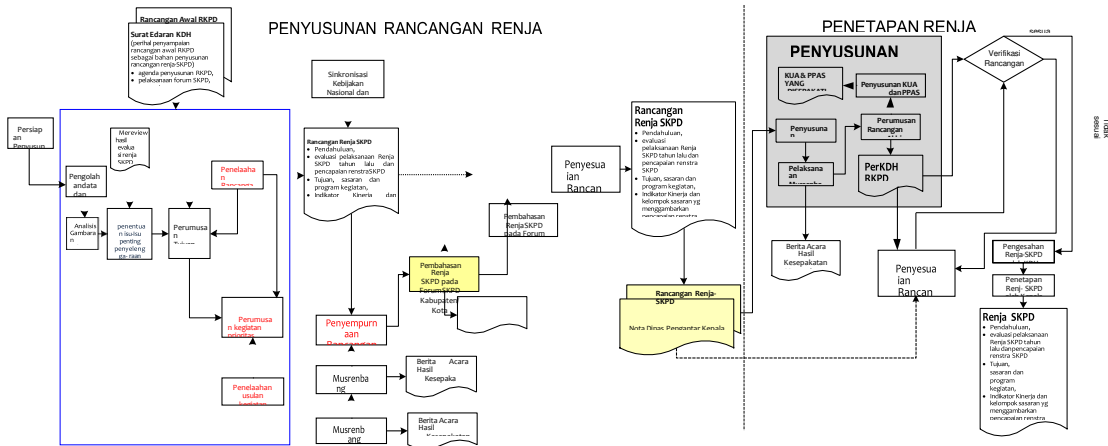
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kerja

Perumusan Renja Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota surabaya merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjadi rancangan akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Kepala Daerah kepada RKPD. Peraturan Kepala Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Adapun Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

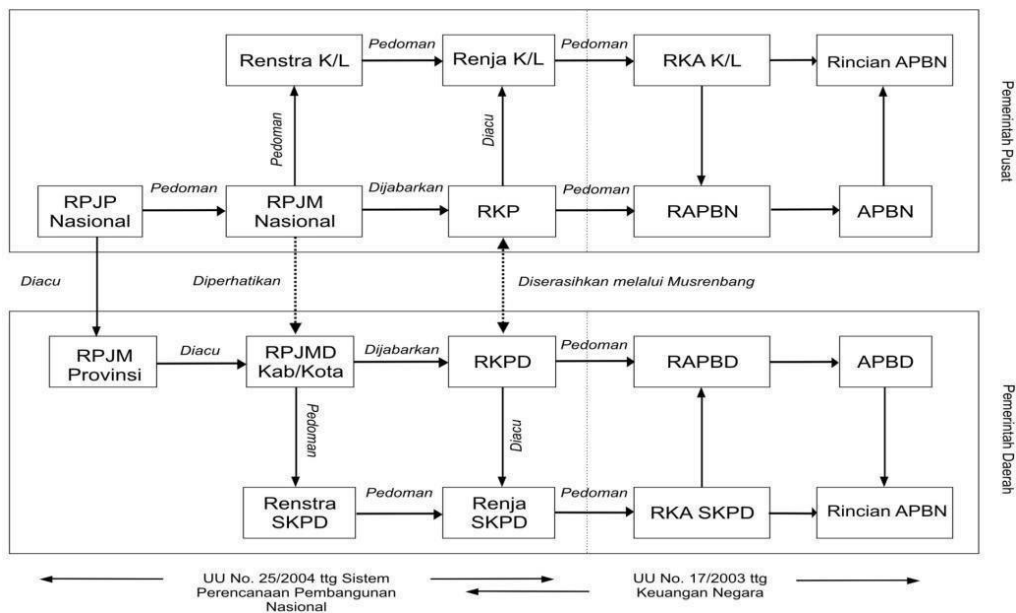
Gambar 1.1
 Proses Penyusunan Rencana Kerja PD



Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Jawa Timur. Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Gambar 1.2
 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/365/436.1.2/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

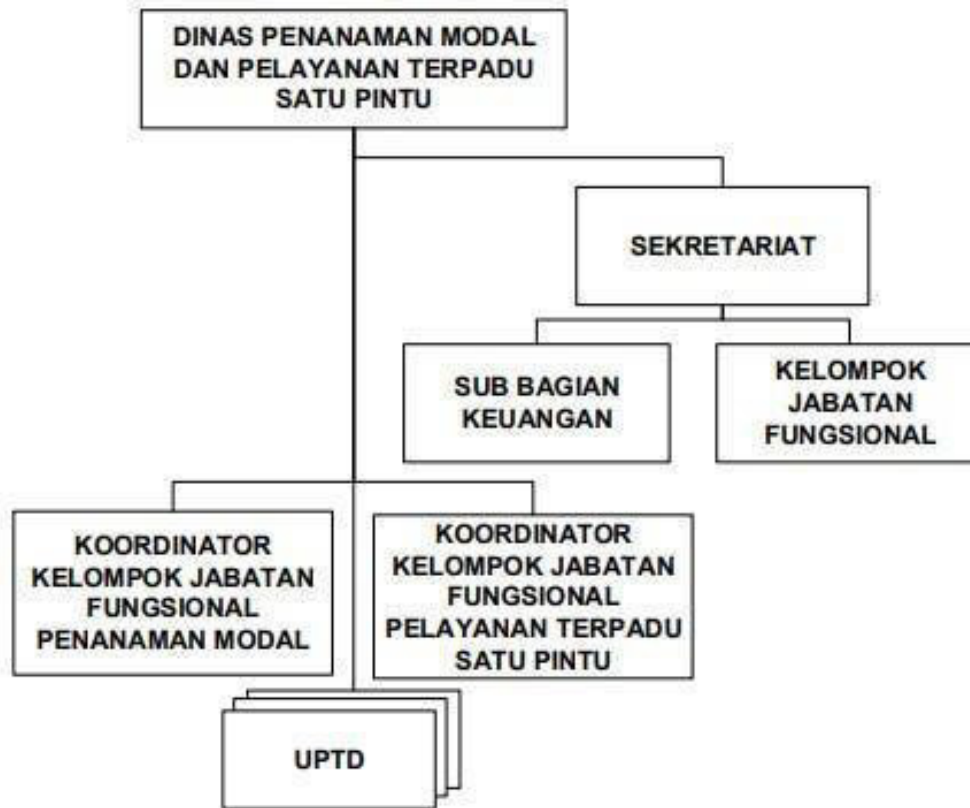
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal, termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;

- h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
- j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 1.3
Bagan Organisasi Perangkat Daerah



Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga urusan penanaman modal tidak memerlukan standart pelayanan minimal.

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian kinerja, permasalahan, hambatan, dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah,

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi proses yang dilakukan pembandingan ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun

kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja 2025 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

a. Evaluasi Renja Tahun 2023

Hasil evaluasi Renja Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Jumlah Investor PMA/PMDN. Dari Target 170 perusahaan telah terealisasi sebesar 170 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal. Dari Target 20 lembaga telah terealisasi sebesar 20 lembaga sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100%.

Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan

Dari target 90% telah terealisasi 92.68% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 102.98%.

d. Program Promosi Penanaman Modal

dengan indikator Persentase calon investor/investor yang mempunyai minat berinvestasi

Dari target 55% telah terealisasi 59.67% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 108.49%.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dengan indikator Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis

Dari target 43% telah terealisasi 45.73% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 106.35%.

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Investor / Investor yang memperoleh informasi Peluang dan Potensi Investasi. Dari Target 250 calon investor/investor telah terealisasi sebesar 305 calon investor/investor sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 122%.

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Persentase kesesuaian usaha terhadap peta potensi dan peluang

usaha. Dari Target 72% telah terealisasi sebesar 77.4% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 107.50%

- c. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Dari Target 85000 berkas telah terealisasi sebesar 103827 berkas sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 122.15%.

Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi. Dari Target 11500 pelaku usaha telah terealisasi sebesar 12373 pelaku usaha sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 107.59%.

- d. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek. Dari Target 1200 perusahaan telah terealisasi sebesar 1230 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 102.50%.

- e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal. Dari Target 350 perusahaan telah terealisasi sebesar 387 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 110.57%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan realisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan adanya jumlah perizinan yang bertambah sehingga banyaknya pemohon yang melakukan perizinan secara online maupun manual seperti :

1. Sistem online memudahkan masyarakat melakukan pengajuan

permohonan perizinan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan
- Meningkatkan pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik dan pertumbuhan realisasi investasi daerah
- Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

- a. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan di unit pelayanan dan klinik investasi yang memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Penyediaan potensi penanaman modal yang berbasis kawasan /proyek yang menarik minat investor.
- d. Pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara intensif dalam pengurusan perizinan dan kewajiban LKPM.
- e. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penanaman Modal yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretarian	92%	90.26%	90%	92.68%	102.98 %	91%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	N/A	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	100.00 %	40 Orang/bulan		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan	100 %	78.37 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sarana Perkantoran								
		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	98.79 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	12 Laporan		
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	12 Laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
		Jumlah Investor PMA/PMDN	210Perusahaan	151%	170Perusahaan	170Perusahaan	100.00 %	190Perusahaan		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76 %	72.81 %	72 %	77.4 %	107.50 %	74 %		
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	N/A		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60%	58.82%	55%	59.67%	108.49 %	55%		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Calon Investor / Investor Yang	300 Calon Investor / Investor	221 Calon Investor / Investor	250 Calon Investor / Investor	305 Calon Investor / Investor	122.00 %	250 Calon Investor / Investor		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi								
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %	3 Dokumen		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	99.35%	100%	100%	100.00 %	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		lingkup penanaman modal								
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	95.000 berkas	N/A	85000 berkas	103827 berkas	122.15 %	90.000 berkas		
		Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya	12.000 Kegiatan usaha	N/A	11500 Kegiatan usaha	12373 Kegiatan usaha	107.59 %	11.500 Kegiatan usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dilakukan pemantauan								
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	10000 Pelaku Usaha	11167 Pelaku Usaha	111.67 %	N/A		
2.18.04.2.01.	Pemantauan Pemenuhan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal									
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	N/A	N/A	11500 Kegiatan Usaha	12373 Kegiatan Usaha	107.59 %	N/A		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
		Persentase perusahaan yang menyampaika	N/A	50.46%	43%	45.73%	106.35 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		n LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis								
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang	1.400 perusahaan	1111 perusahaan	1200 perusahaan	1230 perusahaan	102.50 %	1.300 perusahaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek								
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal									
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	260 Pelaku Usaha	293 Pelaku Usaha	112.69 %	N/A		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal									
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	N/A	N/A	2870 Kegiatan Usaha	3073 Kegiatan Usaha	107.07 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan								
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20lembaga	21%	20lembaga	20lembaga	100.00 %	20lembaga		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang dilakukan	450 perusahaan	309 perusahaan	350 perusahaan	387 perusahaan	110.57 %	400 perusahaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		evaluasi kinerja penanaman modal								
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dimanfaatkan								

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standard pelayanan minimal, hal tersebut tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitandengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- i. Pendidikan;
- ii. Kesehatan;
- iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- iv. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- v. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- vi. Sosial.

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak memiliki Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Kekuatan (*Strength*):

- a. Adanya komitmen dari kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya organisasi
- b. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- d. Kemampuan sumber daya manusia yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kelemahan (*Weakness*):

- a. Keterbatasan sumber daya manusia terutama pada pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal sehubungan beban kerja kewenangan DPMPSTSP sesuai Perwali 41 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Pelayanan non perizinan, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.
- b. Kendala pada sistem elektronik berupa jaringan trouble atau perbaikan sistem yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Sarana dan prasarana pendukung informasi teknologi untuk pelayanan perizinan yang sudah lewat masa manfaat dan tidak optimal, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peluang (*Opportunity*):

- a. Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi
- c. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik

Ancaman (*Threat*):

- a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Sistem Elektronik Perijinan melalui OSS RBA, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.

- b. Belum optimalnya sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko sehingga menyebabkan kendala dalam proses pengurusan perijinan berusaha di daerah, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.
- c. Kurang tepatnya waktu dari pelaku usaha/penanam modal dalam memberikan data kegiatan yang dilakukan terkait kegiatan investasi. , hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- d. Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD yaitu proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil review yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa ada perubahan nama kegiatan, indikator kegiatan dan perubahan anggaran (kenaikan/penurunan pagu indikatif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	14,239,290,972	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92 %	17,297,687,794	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	10,656,389,964	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	12,622,903,553	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	10,656,389,964	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	12,622,903,553	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Satu Pintu					Satu Pintu				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	3,582,901,008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	4,674,784,241	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %				Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	136,986,900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195,406,200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	3,445,914,108	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	4,479,378,041	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor PMA/PMD N	210 Perusahaan	488,654,095	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor PMA/PMD N	210 Perusahaan	488,826,565	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76 %	488,654,095	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	76 %	488,826,565	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	488,654,095	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	488,826,565	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Satu Pintu					Satu Pintu				
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60 %	639,854,708	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	60 %	639,823,419	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	639,854,708	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	300 Calon Investor / Investor	639,823,419	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	639,854,708	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	639,823,419	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Terpadu Satu Pintu	Kabupaten/Kota				Terpadu Satu Pintu	Kabupaten/Kota			
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	3,298,643,158	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	2,959,272,347	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	95.000 berkas	3,298,643,158	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	95.000 berkas	2,959,272,347	
			Jumlah kegiatan	12.000 Kegiatan				Jumlah kegiatan	12.000 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	n usaha				usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan	n usaha		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.000 Pelaku Usaha	2,620,860,314	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.000 Pelaku Usaha	2,336,692,858	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat	12.000 Kegiatan Usaha	677,782,844	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat	12.000 Kegiatan Usaha	622,579,489	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	perizinan berusaha berbasis risiko	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			perizinan berusaha berbasis risiko	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan	45 %	709,850,405	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan	45 %	709,840,880	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis					perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.400 perusahaan	709,850,405	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.400 perusahaan	709,840,880	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi	280 Pelaku Usaha	182,076,962	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi	280 Pelaku Usaha	182,076,962	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Satu Pintu	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Satu Pintu	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi	2930 Kegiatan Usaha	527,773,443	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi	2930 Kegiatan Usaha	527,763,918	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	211,826,175	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	104,739,356	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	211,826,175	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	450 perusahaan	104,739,356	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	a					a					
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	211,826,175	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	104,739,356	
	TOTAL				19,588,119,513	TOTAL				22,200,190,361	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 telah diadakan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholder terkait yang diselenggarakan, pada :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Februari 2024

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Gedung Siola Lantai 3, Ruang Rapat Damarwulan.
Jalan Tunjungan No. 1 – 3 Surabaya

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024, maka para peserta Forum Perangkat Daerah menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kota.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2025 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Program dan sub Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Pada Rencana Kerja Tahun 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Keterkaitan Strategi Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs) • Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing • Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal • Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal • Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal • Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya • Pemutakhiran Peta Potensi Investasi sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah • Perencanaan Berbasis Kinerja disertai output dan outcome yang jelas • Menciptakan Inovasi dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Perizinan • Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat • Koordinator Penanaman Modal • Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja • Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal • Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi • Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar • Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor • Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar • Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri 		
--	--	--

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mendukung Misi Walikota sebagai berikut :

Misi

- a. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan

jasa antar pulau serta internasional

- b. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dan Target 6,90%
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Target 91,08%

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN dengan indikator Nilai Investasi Daerah dan Target 54 Triliyun Rupiah.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP dan Target 88,75.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Penanaman Modal dan Target 96%.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu pada :

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 Kota Surabaya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 - 2026,

Dari 5 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 1 dan 4 dengan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Misi 1**
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

Tujuan :

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

Sasaran :

Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN

- **Misi 4**
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Sasaran :

- Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2025 menjalankan mandat 6 Program dan 10 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.22.200.190.361, adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **17.297.687.794,-** Indikator Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output 92% tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target output 27 orang.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor yang disediakan target output 12 laporan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target output 12 laporan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **488.826.565,-** Indikator Program Jumlah Investor PMA/PMDN dengan target output 210 perusahaan tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota target output 4 dokumen.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **639.823.419,-** Indicator Program persentase calon investor/investor yang mempunyai minat berinvestasi dengan target output 60% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **2.959.272.347,-** indicator Program ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal

dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan indicator Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik target output 14.000 pelaku usaha.
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan indicator Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha target output 12.000 kegiatan usaha.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **709.840.880,-** indicator Program persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis dengan target output 45% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dengan indicator Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko target output 280 pelaku usaha.
- b. Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha target output 2930 kegiatan usaha.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **104.739.356,-** indicator Program jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal dengan target output 20 lembaga tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan

dimanfaatkan target output 4 dokumen.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik jenis program maupun kegiatannya.

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan sebagai berikut secara detail pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 17.297.687.794				Rp 15.852.454.611
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 12.622.903.553			100 %	Rp 13.545.528.060
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/bulan	Rp 12.622.903.553			27 Orang/bulan	Rp 13.545.528.060
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa		100 %	Rp 4.674.784.241			100 %	Rp 2.306.926.551
		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran		100 %				100 %	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan		12 Laporan	Rp 195.406.200			12 Laporan	Rp 180.989.790

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	Rp 4.479.378.041			12 Laporan	Rp 2.125.936.761
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Rp 488.826.565				Rp 665.825.252
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		76 %	Rp 488.826.565			76 %	Rp 665.825.252
2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		4 Dokumen	Rp 488.826.565			4 Dokumen	Rp 665.825.252
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Rp 639.823.419				Rp 738.216.183
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		300 Calon Investor / Investor	Rp 639.823.419			300 Calon Investor / Investor	Rp 738.216.183
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp 639.823.419			3 Dokumen	Rp 738.216.183
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Rp 2.959.272.347				Rp 5.864.491.950

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		95.000 berkas	Rp 2.959.272.347			95.000 berkas	Rp 5.864.491.950
		Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan		12.000 Kegiatan usaha				12.000 Kegiatan usaha	
2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		14.000 Pelaku Usaha	Rp 2.336.692.858			14.000 Pelaku Usaha	Rp 4.772.465.039
2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		12.000 Kegiatan Usaha	Rp 622.579.489			12.000 Kegiatan Usaha	Rp 1.092.026.911
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp 709.840.880				Rp 1.056.164.066
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		1.400 perusahaan	Rp 709.840.880			1.400 perusahaan	Rp 1.056.164.066

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota	telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek							
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		280 Pelaku Usaha	Rp 182.076.962			280 Pelaku Usaha	Rp 283.670.298
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		2930 Kegiatan Usaha	Rp 527.763.918			2930 Kegiatan Usaha	Rp 772.493.768
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp 104.739.356				Rp 377.020.266
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal		450 perusahaan	Rp 104.739.356			450 perusahaan	Rp 377.020.266
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan		4 Dokumen	Rp 104.739.356			4 Dokumen	Rp 377.020.266

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2025. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan disempurnakan menjadi dokumen Renja berdasarkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 2 Agustus 2024
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Lasidi, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013